

## Moderasi Beragama : Analisis Kebijakan Dan Strategi Penguatan Di Kementerian Agama Republik Indonesia

**Rofiqi**

IAI Al-Khairat Pamekasan  
Email: [rofiqie625@gmail.com](mailto:rofiqie625@gmail.com)

**Mohammad Firdaus**

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep  
Email: [firdausmohammad404@gmail.com](mailto:firdausmohammad404@gmail.com)

**Mohamad Salik**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [salik\\_mohamad@yahoo.com](mailto:salik_mohamad@yahoo.com)

**Achmad Zaini**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
Email: [zainiazami@yahoo.com](mailto:zainiazami@yahoo.com)

### ***Abstract***

*Religious moderation is currently a very interesting discussion, not only among academics, but also the public. The emergence of the phenomenon of intolerance and radicalism is certainly a *nuzul asbabun* from moderation so that the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia feels the need to make religious moderation a policy focus. This paper aims to reveal policy analysis and strategies for strengthening religious moderation in the context of education in Indonesia. The research method used is qualitative with the type of library research with the note-taking technique. The results of this study indicate that the policy of strengthening religious moderation is contained in the 2020-2024 RPJMN which promotes strengthening religious moderation through 5 (five) strategies to strengthen religious moderation including: religious broadcasting, education system, management of houses of worship, management of public spaces, and Islamic boarding schools. However, the focus and findings in this study lead to the implementation of the education system in Islamic Higher Education, in which houses of religious moderation are formed at State Islamic Universities in Indonesia.*

**Keywords:** *Religious Moderation, Policy, Strategy.*

### **Abstrak**

Moderasi beragama saat ini menjadi pembahasan yang sangat menarik, tidak hanya di kalangan akademisi, melainkan pula khalayak publik. Munculnya fenomena intoleransi dan radikalisme tentu menjadi *asbabun nuzul* dari adanya moderasi sehingga kementerian Agama Republik Indonesia merasa perlu untuk

menjadikan moderasi beragama sebagai fokus kebijakan. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap analisis kebijakan dan strategi penguatan moderasi beragama dalam konteks pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis *library research* dengan teknik *note – taking*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penguatan moderasi beragama tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang mengusung penguatan moderasi beragama melalui 5 (lima) strategi penguatan moderasi beragama meliputi; penyiaran agama, sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah, pengelolaan ruang publik, dan pesantren. Namun fokus dan temuan dalam penelitian ini bermuara pada pelaksanaan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Islam yang mana dibentuknya rumah moderasi beragama di Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Moderasi Beragama, Kebijakan, Strategi.*

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, moderasi beragama menjadi isu menarik sekaligus strategis yang menghiasi media massa, nasional<sup>1</sup> maupun internasional.<sup>2</sup> Isu ini telah menjadi bahan diskursus ilmiah oleh para akademisi, yang tidak hanya dilakukan di kampus-kampus keagamaan melainkan sampai kepada kampus non-agama (umum)<sup>3</sup>. *Asbabun nuzul* dari fenomena ini tentu tidak terlepas dari maraknya praktek-praktek ekstrimisme, radikalisme yang cenderung membawa motif agama untuk mengklaim keabsahan tindakan mereka. Implikasinya adalah munculnya banyak aliran dan paham yang kemudian merasa paling benar, eksklusivisme kelompok, dan bahkan sampai kepada praktek kekerasan.

Tindakan preventif terhadap segala perilaku yang mengantarkan kepada tindakan ekstrimisme dan terorisme menjadi wajib dilakukan. Sukabdi menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menjadikan individu memiliki potensi besar terjangkau paham eksklusif ini yaitu adanya motivasi, ideologi, dan kemampuan.<sup>4</sup> Dari ketiga faktor ini paling tidak memberikan gambaran bagi kita bahwa perilaku menyimpang ini bisa terjadi terhadap

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, “Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme Di Media Sosial,” *Kominfo.Com*, April 2021.

<sup>2</sup> Noorhaidi Hasan et al., “Counter Terrorism Strategy in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia,” *U.S. Department Of Justice: Office Of Justice Program*, 2012.

<sup>3</sup> Tim Redaksi Unesa, “UNESA Bedah Radikalisme Dan Terorisme Bersama Pakar Dari BNPT, BPIP Dan MPR,” *Unesa News*, April 2021.

<sup>4</sup> Zora A. Sukabdi et al., “Competencies for Rehabilitation Professionals Working with Ideology-Based Terrorism Offenders,” *Crime, Law and Social Change* 78, no. 2 (2022): 189–217, <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10021-6>.

siapapun, tidak mengenal latar belakang pendidikan, latar ekonomi, dan bahkan stratifikasi sosial.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan survei pada tahun 2017 tentang paham radikalisme di lingkungan perguruan tinggi di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan, bahwa sebanyak 39 % mahasiswa tertarik dengan paham radikal dan eksklusif.<sup>5</sup> Hasil survey pada tahun 2019 menambah ironi bagi kita, sebab 10 PTN ternama di Indonesia masih ditemukan potensi besar terjangkitnya paham radikalisme dan ekstrimisme di kalangan mahasiswa.<sup>6</sup> Data survey ini tentu membuka asumsi kuat bahwa penyebaran paham ini menargetkan generasi muda khususnya di tingkat mahasiswa.

Pada ruang lingkup yang lebih sempit, paham radikalisme telah menyasar banyak wilayah di Indonesia. Faham-faham ini tidak hanya menargetkan kota-kota besar sebagai basis tujuan mereka, melainkan wilayah yang kecil sekalipun. Madura salah satunya yang dalam beberapa kasus terakhir mulai disusupi aliran dan paham ini tidak hanya di tingkat masyarakat biasa, melainkan sampai pada Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>7</sup> Kuat dugaan bahwa paham ini tersebar melalui ceramah-ceramah sehingga dalam hal ini densus 88 bekerja sama dengan polri melakukan pembinaan terhadap 75 orang *kebatib* yang tersebar dari 27 Kecamatan se Kabupaten Sumenep.<sup>8</sup> Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama untuk secara bersama-sama menangkal tersebarnya paham ini sehingga dapat menggerogoti masyarakat kita khususnya generasi penerus bangsa.

Dalam upaya mengantisipasi maraknya paham dan praktek radikalisme, peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan moderasi dipercaya dapat menjadi solusi dalam rangka mengajarkan dan menginternalisasikan nilai toleransi kepada peserta didik.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pendidikan moderasi di tingkat perguruan tinggi menjadi wajib diberikan kepada mahasiswa, sebab melalui model pendidikan ini akan diajarkan nilai-nilai toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodir terhadap *local wisdom* dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Jalwis, "Sosialisasi Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa," *Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (2021): 47–63.

<sup>6</sup> Ade Indra Kusuma Muhammad Yasir, "10 PTN Disebut Survei Terpapar Paham Radikalisme BeratNo Title," *Suara.Com*, 2019.

<sup>7</sup> Nur Faishal, "ASN Terduga Teroris Ditangkap Di Madura, Alarm Di Birokrasi," *Jatim Viva.Com*, 2022.

<sup>8</sup> Antara, "Cegah Paham Radikal, Densus 88 Garap 75 Katib Di Madura," *Jawa Pos.Com*, 2022.

<sup>9</sup> In Nashotah, "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Penguatan Karakter Dalam Masyarakat Heterogen," *Prosiding Nasional* 4, no. November (2021): 127–46.

Dalam perkembangan perguruan tinggi di Indonesia, terdapat 2 (dua) jenis perguruan tinggi yang ada, yaitu perguruan tinggi yang berbasis pesantren, dan perguruan tinggi yang non-pesantren.<sup>10</sup> Perguruan tinggi berbasis pesantren biasanya adalah perguruan tinggi yang ada dibawah naungan yayasan pesantren, jika dilihat dari cirinya biasanya perguruan tinggi ini mengintegrasikan kurikulum dan pola pembelajaran yang klasik dan modern.<sup>11</sup> Sementara yang non-pesantren adalah perguruan tinggi yang *pura* tidak berafiliasi kepada pesantren dan materi yang dipakai adalah murni kurikulum sesuai dengan bidang keilmuannya.<sup>12</sup> Dari kedua jenis lembaga perguruan tinggi ini secara kasat mata dapat kita lihat perbedaannya dalam muatan kurikulum yang diberikan. Perguruan tinggi berbasis pesantren cenderung mempertahankan tradisi keilmuan klasik seperti kurikulum-kurikulum agama, baca kitab kuning, sementara perguruan tinggi non-pesantren menerapkan sistem perguruan tinggi yang murni, didasarkan pada konsentrasi dan bidang keilmuan yang ditekuni. Artinya adalah bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai suasana dan budaya akademik yang unik dan tidak sama satu sama lain. Keunikan tersebut lahir dari kondisi sosio-kultural, visi-misi, dan kurikulum yang diterapkan.

Terlepas dari itu semua, pendidikan moderasi harus menjadi *concern* bersama sebagai bentuk semangat persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan jenis perguruan tinggi. Sejauh ini kebijakan moderasi beragama yang dikeluarkan pemerintah mendapatkan respon akademis dan sosial yang berbeda-beda dari civitas perguruan tinggi.<sup>13</sup> Perbedaan respon ini paling tidak menguatkan dugaan bahwa implementasi pendidikan moderasi beragama di perguruan tinggi memiliki kecenderungan yang berbeda baik dilihat dari kebijakan, kurikulum, serta pola pembelajaran yang dikembangkan. Perbedaan tersebut juga akan mewarnai pelaksanaan pendidikan moderasi beragama.

---

<sup>10</sup> Muhammad Munif and Hasan Baharun, "Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren: Menggagas Interkoneksi Agama Dan Sains," *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2018): 137, <https://doi.org/10.21043/jp.v12i1.4928>.

<sup>11</sup> Muhammad Mushfi El Iq Bali, "No Title," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 1–14.

<sup>12</sup> Sastramayania dan Sabdah, "Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum: Studi Kasus Di Universitas Lakidende," *Shaukat Tarbiyah* 35, no. XXII (2016): 138–55.

<sup>13</sup> Abdul Rosyid, "Moderasi Beragama Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan : Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama," *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2022): 101–10.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tema ini yang salah satunya dilakukan oleh Yedi Purwanto Dkk<sup>14</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola internalisasi nilai-nilai moderasi melalui mata kuliah PAI dilakukan dengan cara pembelajaran tatap muka dalam perkuliahan, tutorial, seminar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulianti<sup>15</sup>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan lembaga perguruan tinggi terhadap penerapan moderasi adalah menjunjung tinggi asas musyawarah, mensosialisasi prosedur kebijakan yang memihak kepentingan dan selalu mengupayakan kemaslahatan warga kampus sebagai bentuk internalisasi moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi mereka.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan kepada jenis data yang diperlukan yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan. Artinya, pada penelitian ini akan memanfaatkan beberapa sumber perpustakaan untuk kemudian akan memperoleh data penelitian. Sebagaimana penelitian kepustakaan lainnya, studi ini hanya dibatasi oleh proses penelitian yang bersumber dari buku, artikel jurnal, serta koleksi kepustakaan yang lain tanpa harus terjun langsung ke lapangan<sup>16</sup>. Dengan demikian, penelitian ini akan memanfaatkan beberapa referensi berupa buku, arsip, dokumen, jurnal, catatan, dokumentasi film fotografi, monografi, dokumentasi statistik, surat-surat dan lain sebagainya sebagai sumber data yang akan dimanfaatkan oleh peneliti

### **Konsep dan Urgensi Moderasi dalam Pendidikan Islam**

Menurut Bernard Lewis, pengertian moderat dalam Islam merupakan bagian penting dari wacana masyarakat muslim sejak periode klasik. Hal ini tercermin dari isi ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar budaya.<sup>17</sup> Hal ini juga sejalan dengan sabda Nabi bahwa perbedaan adalah rahmat dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini kemudian terus mengakar dan tumbuh menjadi landasan Islam moderat hingga masa modern seperti saat ini. Sejarah membuktikan bahwa gerakan-gerakan intoleran dan radikal atas nama Islam hampir tidak ada pada

---

<sup>14</sup> Yedi Purwanto et al., "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 110–24, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.605>.

<sup>15</sup> Y Yulianti, "Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Umum Swasta," *Seminar Pendidikan Agama Islam*, 2022, 27–31.

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

<sup>17</sup> Adian Husaini (2017), "Bernard Lewis dan Apologia Barat," *Tsaqafah*, Jil. 13, No.1, 25.

masa Nabi Muhammad SAW. Pembantaian non muslim, pengusiran orang kafir, atau pembakaran tempat ibadah hampir tidak pernah terjadi. Gerakan radikal ini baru muncul akhir-akhir ini ketika sebagian umat Islam salah memahami konsep dakwah *rahmatan lil alamin*.

Kelompok Muslim seperti Taliban dan Al-Qaeda adalah beberapa kelompok yang diklaim radikal tetapi mendapat dukungan dari masyarakat. Kelompok ini tentu berbeda dengan konsep Islam moderat yang menerima kemajuan modern dalam dimensi yang terbatas. Meski peran mereka dalam menjaga kemurnian ajaran Islam tidak dapat disangkal, pemahaman mereka tentang Islam tidak relevan dan bertentangan dengan ideologi negara-negara modern. Misalnya, sistem kekhalifahan merupakan ciri umum dan tipikal pemerintahan Islam pada masa Nabi.<sup>18</sup> Namun, di zaman modern ini dipandang sebagai konsep yang kontradiktif, dan beberapa negara menentanginya.

Menurut Abou Fadl (Kuwait), corak Islam saat ini dapat diklasifikasikan menjadi dua model, puritan dan moderat. Moderat dalam konteks ini berbeda dengan istilah lain seperti progresif, reformis, dan modernisme. Progresif dan reformis berkaitan erat dengan model implementasi diktator.<sup>19</sup> Sebagian orang mengklaim bahwa pemikiran reformis (revolusi) merupakan percepatan menuju kemajuan Islam. Padahal, banyak perspektif liberal yang berujung pada runtuhnya sebuah peradaban dan hilangnya kearifan lokal. Istilah reformis juga demikian. Menurut Abu Fadl, mereka adalah kelompok umat Islam yang menolak modernitas dan cenderung reaksioner.

Oleh karena itu, Islam moderat adalah jalan tengah. Hal ini sejalan dengan pernyataan dalam Al-Qur'an dan tindakan Nabi ketika menghadapi masalah ekstrim. Jika ada masalah krusial dan sensitif, Nabi tidak akan terburu-buru menanganinya. Ia akan selalu mengambil jalan tengah yang kemudian diartikan sebagai musyawarah. Demikian pula, Islam moderat memiliki ciri menghargai kearifan masa lalu dengan menyeimbangkannya dengan aktualisasi era modern.<sup>20</sup>

Namun, sebagian orang tidak setuju dengan konsep Islam moderat. Greg Fealey, misalnya, memandang Islam moderat sebagai produk Barat (Amerika) yang sengaja disusun untuk meminimalisir kehadiran terorisme. Senada dengan itu, Hasyim Muzadi berpendapat bahwa Islam moderat adalah

---

<sup>18</sup> Happy Saputra, Mahdalena Nasrun and Muhammad Anzaikhan (2021), "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Melakukan Radikalisme di Aceh," *INOVASI: Jurnal Kajian Inovasi Keagamaan*, Jil. 21, No.2, 112-121.

<sup>19</sup> Qurrotul Ainiyah (2019), "Fikih Islam Kontemporer Melalui Karya Khaled Abou El Fadl," *Yurisprudensi*, Jil. 11, No.1, 22

<sup>20</sup> Rusli Rusli, "Gagasan Khaled Abou Fadl Tentang Islam Moderat versus Islam Puritan (Perspektif Sosiologi Pengetahuan)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Jul. 8, No.1 (2009), 99

topeng kelompok Islam liberal agar ajarannya diterima masyarakat.<sup>21</sup> Lebih lanjut Muzadi menambahkan bahwa Islam liberal bergerak di balik bayang-bayang Islam moderat sehingga dimensi rasional (burhani) dapat menjadi alat yang dominan dalam memahami Al-Qur'an dan Hadist.

Senada dengan Fealey dan Muzadi, Chomsky juga menyampaikan hal yang sama, menurutnya ini adalah strategi Amerika untuk mendapatkan dukungan internasional terkait gesekan ideologi antara Barat dan Muslim. Wacana moderat sengaja disebarluaskan untuk menciptakan identitas baru untuk melawan mereka yang menentang Amerika. Akbar Ahmed (Pakistan) juga merupakan salah satu tokoh yang menolak mengklasifikasikan Islam ke dalam kategori teroris dan moderat. Dia lebih suka mengklasifikasikannya menjadi mitos, modernis, dan tekstualis.<sup>10</sup> Kalangan mitos atau yang disebut juga kelompok Islam mistik adalah mereka yang meyakini bahwa dimensi ghaib berperan penting dalam kehidupan umat Islam dan praktik ibadahnya. Kelompok ini ada sekitar abad ke-13 ketika kaum sufi dan ajarannya sedang naik daun.

Sedangkan kaum modernis adalah kelompok Islam yang bertujuan untuk menyeimbangkan budaya dan peradaban modern. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa Islam dapat beradaptasi dan bersaing dengan peradaban barat yang ada. Grup diprediksi dominan di awal 20-anthabad. Terakhir, tekstualis adalah kelompok Muslim garis keras seperti Hamas, Taliban dan Ikhwanul Muslimin. Mereka yang memahami Al-Qur'an secara tradisional dan beranggapan bahwa kejayaan umat Islam hanya bisa dipulihkan dengan menerapkan ajaran Nabi di abad ke-7. Terhadap kelompok ini, Islam saat ini sedang ditindas, dan penindasan ini tidak akan berakhir tanpa perlawanan serius.<sup>22</sup>

Penulis mengadopsi tokoh-tokoh di atas untuk menggambarkan bahwa Islam memoderasi dirinya sendiri, bahkan sejak awal, memiliki pro dan kontra (pendukung dan penentang). Semua memiliki persepsi sendiri tentang bagaimana konsep Islam harus dipraktikkan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, wacana Islam Moderat yang cenderung bergerak dalam mempromosikan toleransi dan kontekstualisasi agama lebih relevan, mengingat Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas demokrasi. Indonesia bukanlah negara teokratis dan juga bukan negara yang secara konstitusional mengakui satu agama tertentu. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang mencanangkan pentingnya Islam moderat lebih layak dijadikan rujukan dan

---

<sup>21</sup> Rusli Rusli, "Gagasan Khaled Abou Fadl Tentang Islam Moderat versus Islam Puritan (Perspektif Sosiologi Pengetahuan)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Jil. 8, No.1, (2009). 99.

<sup>22</sup> Nafi Mutaakhirin, "Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial," *Afkaruna*, Jil. 11, No.2, (2015), 240-259.

diandalkan dalam menjaga persatuan Indonesia dan menghindari perpecahan karena perbedaan agama dan suku yang ada.

Salah satu istilah populer terkait Islam moderat di Indonesia adalah Islam *wasathiyah*. Pada dasarnya, Islam moderat dan Islam *wasathiyah* memiliki arti yang sama, namun karena kegemaran muslim Indonesia terhadap istilah kebahasaan Islam, istilah tersebut Islam *wasathiyah* dianggap lebih dapat diterima oleh masyarakat.<sup>23</sup> *wasathiyah*, dalam , berasal dari kata *wasathan* yang memiliki beberapa arti diantaranya titik tengah dan seimbang. Juga mengandung makna keadilan, ketegasan, kebaikan, keamanan, dan kekuatan.

Kata *wasathiyah* memiliki dua arti; selalu menghindari perilaku ekstrim atau pengungkapan yang mengarah ke dimensi atau jalan tengah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderat diartikan cenderung berada pada titik tengah (radikal) dan tidak dalam pengertian yang ekstrim.<sup>24</sup> Sebagai middle liner, seseorang harus mampu berdiri tegak dan berpegang teguh pada kebenaran untuk menyatukan dua persoalan secara seimbang tanpa bias dan dapat menyelesaikannya secara harmonis tanpa harus mengorbankan nilai kebenaran yang ada.

Mengedepankan sikap moderat harus disesuaikan dengan karakter utama seorang muslim. Menafsir moderat berarti menjadikan Islam sebagai metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku. Bersikap seimbang dalam menyikapi dua situasi sehingga ditemukan sikap yang sesuai antara prinsip Islam dan tradisi Islam di masing masing daerah, termasuk keseimbangan akidah, ibadah dan akhlak. Quraish Shihab mengartikan kata tersebut *wasathan* sebagai menengah, moderat, dan keteladanan, di mana posisi akan mengarahkan individu untuk tidak melihat satu sisi tertentu tetapi bertindak adil.<sup>25</sup>

Saat ini, arti kata Islam dan *wasathiyah* menciptakan keharusan bagi umat Islam untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang mencakup toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas untuk membawa perdamaian dunia dan menolak segala bentuk tindakan ekstrim dan kekerasan. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari perang dan menciptakan kedamaian, keamanan, dan keadilan bagi setiap individu di dunia tanpa kecuali.

---

<sup>23</sup> Zainun Wafiqatun Niam, "Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan lil 'alamin: Peran Nu dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia," *Palita: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Jil. 4, No.2, (2019), 91-106

<sup>24</sup> Trini Diyani, "Implementasi Paradigma Islam Wasathiyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Jil. 6, No.3, (2019) 303-316.

<sup>25</sup> Syafri Samsudin (2021), "Konsep Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer," Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **Indikator Moderasi Beragama**

Internalisasi moderasi beragama dari paparan definisi di atas dapat disimpulkan sebagai penggabungan atau penyatuan atau proses pengambilan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Adapun Indikator moderasi beragama terdiri dari empat poin, yaitu:<sup>26</sup> a) Komitmen, kebangsaan, b) Toleransi, c) Anti-Kekerasan, dan d) Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Penjelasan rinci terkait indikator moderasi beragama menurut sebagai berikut:

### **1. Komitmen Kebangsaan**

Indikator pertama yaitu komitmen kebangsaan bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara.<sup>27</sup> Wawasan kebangsaan juga identik dengan wawasan nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.<sup>28</sup>

### **2. Toleransi**

Indikator kedua yaitu toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.<sup>29</sup> Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.<sup>30</sup> Melalui relasi antar agama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intra agama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

### **3. Anti-Kekerasan**

Indikator ketiga yaitu anti-kekerasan (radikal). Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama dipahami sebagai suatu ide dan paham yang

---

<sup>26</sup> Ni Wayan Apriani and Ni Komang Aryani, *Moderasi Beragama, Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*, vol. 12, 2022, <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.

<sup>27</sup> Nasrullah Nurdin, "Nationality Insight , State Commitment and Nationalism in the View of Prof. Dr . KH Ali," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 1 (2018): 105–34.

<sup>28</sup> Asliah Zainal, "Meneguhkan Komitmen Keislaman Dalam Bingkai Kebangsaan": Gerakan Counter Culture Kiai Syarif Dan Padasuka", Social trust fund, UIN Jakarta, (2014).

<sup>29</sup> Rifqi Muhammad, "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 98.

<sup>30</sup> Apriani and Aryani, *Moderasi Beragama*.

ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan/ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Sehingga anti-kekerasan adalah ide atau gagasan yang anti untuk melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan atas nama agama, baik kekerasan dalam bentuk verbal, fisik dan pikiran.<sup>31</sup>

#### 4. Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal

Indikator keempat yaitu praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.<sup>32</sup> Akomodasi budaya lokal dalam Islam sama artinya dengan prinsip ketiga yang diajarkan oleh Sunan kalijaga dalam kidungnya. Jadi budaya lokal itu bisa dimuat dalam ajaran Islam yang prinsipnya mengasihi. Contohnya ketika pada zaman hindu kita mengenal wayang dengan kisah Mahabarata dan Ramayana yang penuh dengan konsep Hindu yakni trimurti (tiga dewa), pada masa wali songo, wayang tak serta merta diberangus dan digantikan oleh budaya Islam seperti gambus atau yang lainnya. Malah mereka mengkonsepsikan dewa sebagai aparatur Tuhan dan bukan lagi sebagai konsep Tuhan yang mereka buat dalam lakon Dewa Ruci.<sup>33</sup>

#### Arah Kebijakan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024

KMA No. 164 Tahun 2014 adalah KMA yang mengatur tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Begitupun KMA 183 tahun 2019 juga merupakan KMA yang mengatur Kurikulum PAI. Artinya KMA 183 2019 sebagai aturan yang baru me-*nasik*hkan KMA 164 tahun 2014 sehingga menjadikan KMA 164 2014 *mansuk*h. Dengan demikian hal ini bisa dikatakan sebagai upaya pengembangan kurikulum PAI.

Pada aspek tujuan ada pengembangan atau perubahan arah yang signifikan. Pada KMA 164 Tahun 2014 tujuan kurikulum PAI adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Selanjutnya pada KMA 183 2019 tujuan kurikulum PAI adalah untuk

---

<sup>31</sup> Apriani and Aryani, *Moderasi Beragama*.

<sup>32</sup> M Samson Fajar and Sabdo Sabdo, "Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.718>.

<sup>33</sup> Antrop, "Manusia Dalam Kehidupan Sosial Perspektif Antropologi", *Jurnal Antropologi*, <https://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/2011/01/07/akomodasi-budaya-lokal-dalam-islam/>

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

Dari tujuan ini terlihat ada penekanan pada sikap keagamaan moderat, inklusif, berbudaya dan religius. Ini merupakan salah satu target pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hal yang sebenarnya sesuai dengan konsep peran pendidikan agama Islam yakni kontra radikalisme.<sup>34</sup> Kementerian Agama juga sudah menyusun konseptual moderasi beragama melalui buku *Moderasi Beragama*.<sup>35</sup> UNESCO sendiri menilai pendidikan berkualitas semestinya mengarah pada toleransi, kedamaian, hak asasi manusia dan kewarganegaraan demokratis.<sup>36</sup> Pendidikan berkualitas menghasilkan resolusi tanpa konflik. Apalagi Indonesia yang sangat multikultural, sangat penting setiap warga memiliki sikap moderat.<sup>37</sup>

Membangun sikap moderat, inklusif, berbudaya dan religius tentu menjadi tantangan bagi madrasah kedepan. Namun ini bukan hal yang tidak mungkin. Madrasah dapat membangun konsep yang tepat agar mampu menjalankan program ini dan mencapai target. Beberapa sekolah telah mencontohkan hal ini, misalnya beberapa sekolah menengah atas (SMA) di Palu.<sup>38</sup> Namun, kebijakan ini semestinya tidak hanya menasar madrasah sebagai sekolah umat Islam. Konsep ini juga harus di kembangkan pada sekolah-sekolah agama lainnya. Sikap moderat, berbudaya dan religius harus menjadi bagian tujuan pendidikan dalam berbagai model. Dengan terbit dan dilaksanakannya KMA 183 2019 ini, menjadi tantangan bagi Madrasah untuk menjadi pionir dalam mewujudkan cita-cita besar ini.

---

<sup>34</sup> Jose Antonio Rodríguez, "Islamic religious education and the plan against violent radicalization in Spain," *Journal British Journal of Religious Education* 41 (2019): 412–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01416200.2018.1484693>.

<sup>35</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Moderasi beragama*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), [http://files/60/Indonesia and Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan - 2019 - Moderasi beragama..pdf](http://files/60/Indonesia%20and%20Badan%20Litbang%20Agama%20dan%20Diklat%20Keagamaan%20-%202019%20-%20Moderasi%20beragama.pdf).

<sup>36</sup> Mary Joy Pigozzi, "A UNESCO View of Global Citizenship Education," *Educational Review* 58, no. 1 (15 Juli 2006): 1–4, <https://doi.org/10.1080/00131910500352473>.

<sup>37</sup> Amiruddin, Askar, dan Yusra "Development of Islamic Religious Education Learning Model Based on Multicultural Values," *International Journal Of Contemporary Islamic Education* 1, no. 1 (15 Juli 2019): 1–19, <https://doi.org/10.24239/ijciied.Vol1.Iss1.2>.

<sup>38</sup> Amiruddin, Askar, dan Yusra.

Selain itu, pada KMA 183 2019 ini Madrasah diharapkan ada peningkatan target yang tidak hanya sebagai warga negara namun sebagai bagian masyarakat dunia (*global citizenship*). Artinya Madrasah diharapkan mempersiapkan siswanya untuk menjadi warga dunia yang dapat berkolaborasi untuk mendapatkan solusi problem dunia. Berbagai konsep kurikulum dibangun dengan menysasar tujuan ini, menjadikan pribadi-pribadi warga global.<sup>39</sup> Kesiapan hidup bersama sebagai warga dunia masih dianggap UNESCO sebagai problem serius yang masih menghantui dunia saat ini.<sup>40</sup>

Artinya konektivitas global yang kuat saat ini menuntut pemahaman yang layak setiap pribadi sebagai warga global. Setiap pribadi dapat mengambil peran dalam mencari solusi berbagai problem dunia tanpa tersekat oleh teritorial. Selain itu, tentu saja diharapkan terbangun sikap saling paham akan tradisi atau budaya masing-masing wilayah, sangat variatif bahkan mungkin bisa saling bertolak belakang makna atau nilai antar daerah satu dengan yang lainnya. Kurikulum PAI melalui KMA 183 2019 ini ingin membangun pribadi yang akrab dengan multikultural di berbagai belahan dunia.

Tujuan kurikulum PAI ini sebenarnya selaras dengan visi kementerian agama yang ingin mewujudkan masyarakat yang religius dan rukun.<sup>41</sup> Visi misi ini dibuat dengan diterbitkannya KMA nomor 39 tahun 2015. Artinya tujuan PAI tidak hanya taat beragama akan tetapi juga dapat berkolaborasi dengan yang lainnya. Sesuai juga dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan UNESCO yakni *learning to know, learning to do, learning to be* dan *learning to live together*. Hal ini juga yang menjadi perhatian Delors pada pembukaan *International Congress on Lifelong Learning* pada 2011.<sup>42</sup> *The big goal is* pendidikan adalah dapat hidup bersama dalam keragaman.

Selain arah atau tujuan yang diperkuat, Pada KMA 183 tahun 2019, dijelaskan juga landasan kurikulum PAI dan yakni yakni landasan filosofis, sosiologis, psiko pedagogis dan teoritik. Secara filosofis pengembangan kurikulum ini dilakukan karena pendidikan untuk kehidupan masa depan, agama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, sasaran utama PAI adalah mengelola hati, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa, dan guru harus menjadi teladan.

---

<sup>39</sup> Namrata Sharma, "Value-Creating Perspectives and an Intercultural Approach to Curriculum for Global Citizenship," 2020, 16, <http://files/70/Sharma - Value-Creating Perspectives and an Intercultural A.pdf>.

<sup>40</sup> Pigozzi, "A UNESCO View of Global Citizenship Education."

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, "Visi Misi," 15 Juni 2015, <https://kemenag.go.id/home/artikel/12433/visi>.

<sup>42</sup> Jacques Delors, "The Treasure within: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together and Learning to Be. What Is the Value of That Treasure 15 Years after Its Publication?," *International Review of Education* 59, no. 3 (15 Juli 2013): 319–30, <https://doi.org/10.1007/s11159-013-9350-8>.

Landasan sosiologis pengembangan PAI tidak lain adalah kehidupan ini dinamis, PAI harus menanggapi kedinamisan ini. PAI diharapkan menjadi pendorong Madrasah menjadi *agent of change*. Dari aspek psikopedagogik PAI dipandang harus memenuhi konsep pedagogik transformatif yakni memperhatikan perkembangan psikologis, konteks lingkungan dan zamannya. Pada aspek teoritik yang menjadi landasan pengembangan kurikulum PAI ini adalah teori *standard based education and Competency Based curriculum*. Kurikulum yang berlandaskan target kompetensi menjadi kurikulum harapan kedepan. Kurikulum model ini telah menjadi tuntutan di berbagai negara dalam berbagai bidang.<sup>43</sup>

Artinya ini merupakan upaya peningkatan dengan melakukan standarisasi pendidikan agama Islam di Madrasah. Pada KMA sebelumnya hal ini tidak ada. Ini menggambarkan kurikulum PAI dan sesuai KMA 183 2020 ini sudah melalui kajian yang mendalam. Ada hal-hal yang mendasari pengembangan yang dilakukan. Dari itu jumlah halaman KMA ini juga terlihat lebih banyak dari sebelumnya, pada KMA 183 2019 ada 466 halaman, sedangkan KMA sebelumnya 321 halaman beserta lampirannya.

Pengembangan PAI melalui KMA 183 tahun 2019 berdasarkan beberapa rasionalisasi dimulai dengan menilik tantangan PAI ke depan baik dari internal maupun eksternal. Pada aspek tantangan internal, Madrasah masih dinilai belum mencapai tujuan secara masif bertakwa dan berakhlak mulia. Artinya aspek sikap belum maksimal dan merata tercapai. Selain itu, adanya kecenderungan pola beragama yang tidak *wasath* yakni ekstrim-tekstualitas dan sekuler-liberalis. Padahal ini merupakan cara beragama yang tidak substantif keluar dari kekhasan beragama bangsa Indonesia. Model beragama yang ekstrim inilah yang dapat merusak keutuhan bangsa, dapat memicu perpecahan NKRI. Pada sisi eksternal isu transnasional, lingkungan hidup, teknologi informasi, industri kreatif, budaya dan era dirupsi menjadi tantangan PAI kedepan.

Terkait tantangan ini, sebenarnya Ekonom Perancis Delors sudah lama mengingatkan, ia menyebutkan tiga tantangan pendidikan ke depan, yakni globalisasi, individualisme kontemporer serta media, teknologi dan ideologi ekonomi yang dominan.<sup>44</sup> Globalisasi dimana dunia menjadi tanpa sekat, budaya menjadi mudah diadopsi oleh masyarakat global yang lain. Koneksi antar manusia dari berbagai elemen sangat mudah meski terpisah jarak.

---

<sup>43</sup> Stacey Chamberlain et al., "A global health capstone: an innovative educational approach in a competency- based curriculum for medical students," *BMC Medical Education*, 2020, 1–8; Cheptoo Ruth, "The „Africanized“ Competency-Based Curriculum: The Twenty-First Century Strides," *Sbanlax* 7, no. 4 (2019): 46–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.34293/education.v7i4.640>.

<sup>44</sup> Delors, "The Treasure within: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together and Learning to Be. What Is the Value of That Treasure 15 Years after Its Publication?"

Individualisme kontemporer menurut Delors adalah problem yang banyak dialami masyarakat dunia. Ia menyebutnya kesepian dalam keramaian. Banyak yang merasa tidak lagi menjadi bagian dari komunitas. Semangat kompetisi menurunkan minat kerjasama. Media dan teknologi juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Delors menyebutnya dengan sindrom “*cult of the present minute*” dan *the “emotional society”*. Selain itu, menurutnya ideologi yang menjadikan pasar penentu segalanya sangat merusak tatanan sosial.

Rasionalisasi berikutnya adalah penyempurnaan pola pikir. Upaya yang ditawarkan melalui kurikulum baru ini dengan mengubah pola belajar. Pola belajar *teacher-centered* diubah ke *student-centered*. Berbagai riset menunjukkan pengaruh positif penggunaan pola belajar *student-center* ini.<sup>45</sup> Pola ini menuntut sistem belajar *active learning*. Selain itu, diharapkan memanfaatkan multimedia yang menjadikan proses belajar lebih menarik. Pada target, belajar PAI diharapkan tidak hanya menambah wawasan (*knowledge*) tapi juga mengubah sikap dan perilaku. Hubungan guru-siswa diharapkan terbangun *mababbah fillah* dalam upaya bersama mencapai keridhaan Allah SWT.

Rasionalisasi ketiga adalah hingga penguatan tata kelola. Penguatan tata kelola ini berada pada lima pilar yakni keagamaan, kebangsaan, kemandirian, keumatan dan kemodernan. Penguatan tata kelola ini dari berbagai aspek baik guru, manajemen, nilai-nilai dan fokus artinya kedepan diharapkan madrasah membenahi diri dari berbagai aspek tata kelola.

Selanjutnya, melihat kompetensi inti dari kedua KMA, nyaris tidak ada perubahan berarti. Kedua nya menjelaskan keempat aspek kompetensi setiap kelas. Kompetensi Inti (KI) yang disebut dengan KI-1 untuk aspek sikap spiritual, KI-2 aspek sikap sosial, KI-3 aspek pengetahuan dan KI-4 aspek keterampilan. Hanya bentuk tabel dilakukan perubahan, Pada KMA 183 2019, kompetensi inti diletakkan sejajar berada dalam satu baris (*row*) dilanjutkan kompetensi dasar di bawahnya. Sebelumnya kompetensi inti setiap aspek dijelaskan oleh kompetensi dasar yang sebaris dengannya. 4 kompetensi inti berada dalam 1 (satu) kolom (*column*) yang sama.

Namun jika dilihat ke kompetensi dasar, terlihat beberapa perubahan misalnya pada KI-2 terkait dengan sikap sosial. Pada Poin A al-Quran dan Hadis untuk MI kelas I semester ganjil pada KMA sebelumnya capaian kompetensi dasar yang menjadi ukuran adalah terbiasa membaca al-Quran dengan benar dan baik sesuai hukum tajwid dan terbiasa mengamalkan kandungan surat *al-Fatihah*,

---

<sup>45</sup> Mujtaba Saeed Arman, “Student-centered approach to teaching: It takes two to tango,” *The Abjad Journal* 35, no. 2 (2018): 64–71; Gezim Bara dan Nazmi Xhomara, “The Effect of Student-Centered Teaching and Problem-Based Learning on Academic Achievement in Science,” *Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION* 17, no. 2 (2020): 180–99; Natalya V Solovova et al., “Realization of Student-Centered Approach in Learning Environmental Knowledge,” *Ekoloji* 27 (2018): 2095–2103.

*an-Nas, al-Falaq, al-Ikhlās* dan *al-Labab*. Pada poin membaca al-Quran dengan baik dan benar tidak ada masalah, namun mengamalkan beberapa surat tersebut cukup sulit diukur. Probleminya adalah pemahaman tentang surat-surat tersebut akan cukup luas. Wajar kemudian hasil kajiannya menunjukkan belum tercapainya secara masif aspek sikap sosial pada siswa. Hal inilah yang disebutkan pada KMA 183 2019 sebagai salah satu tantangan internal.

Pada KMA 183 kompetensi dasar pada KI-2 (sikap sosial) tersebut diubah, menjadi menunjukkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkan sikap percaya diri sebagai mukmin. Ini lebih jelas dan tegas menjadi mudah terukur. Begitupun pada kompetensi dasar KI-2 kelas 1 semester genap, dilakukan perubahan. Kompetensi dasar versi KMA 165 2014 memang „aneh“. Antara kompetensi inti dengan kompetensi dasarnya berselisih. Kompetensi intinya memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Salah satu kompetensi dasarnya membiasakan membaca huruf hijaiyah sesuai *makhraj* dan tanda baca. Bagaimana bisa kompetensi dasar ini mencapai titik akhirnya kompetensi inti, cukup sulit. Kalaupun sampai pada kompetensi inti jalannya berputar-putar terlalu jauh. Pada KMA 183 2019 kompetensi dasar tersebut diubah menjadi mengamalkan sikap disiplin dan berperilaku santun kepada orang tua, keluarga, teman dan guru. Begitupun kompetensi dasar berikutnya, terkhususnya pada sikap sosial, dilakukan perubahan.

Pada KI-3 (pengetahuan) kompetensi dasarnya juga diubah. Pada mata pelajaran al-Quran Hadis kelas I semester ganjil diksi yang dipilih pada KMA 165 2014 adalah mengetahui dan mengenal sedangkan pada KMA 183 2019 ditingkatkan menjadi memahami. Hal ini dinyatakan meningkat karena memahami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V diartikan mengetahui benar. Hal ini sebenarnya terlihat sepele padahal pemilihan diksi ini memberi dampak kejelasan tujuan. Kejelasan tujuan sangat penting bagi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran.

Kompetensi dasar pada aspek keterampilan (KI-4) juga diubah. Sebelumnya dipilih diksi membaca dan menghafal sedangkan yang terbaru mendemonstrasikan dan melafalkan. Mendemonstrasikan memiliki arti lebih luas, tidak hanya membaca tapi juga mempertontonkan, memperagakan. Namun diksi melafalkan ini menurun jika dibandingkan dengan keterampilan menghafal. Meskipun jika mempertimbangkan waktu belajar menghafal akan lebih sulit dicapai, melafalkan lebih memungkinkan. Apalagi untuk anak usia 7 tahunan tentu lebih menantang lagi. Anak usia awal sekolah masih dalam tahap memahami hal-hal sederhana.<sup>46</sup> Namun, menghafal bisa menjadi pilihan yang baik dalam bentuk penugasan. Jika dilihat lebih jauh ternyata kompetensi dasar

---

<sup>46</sup> Overby Jeanna, *Development Psychology* (Delhi: The English Press., 2012). 23.

ini tidak benar-benar dihapus, ini muncul di kompetensi dasar KI-4 (keterampilan) pada kelas III semester ganjil. Artinya pertimbangan perkembangan anak menjadi perhatian dalam KMA 183 2019 ini dalam menetapkan kompetensi yang akan dicapai.

Artinya perubahan kurikulum ini sudah sangat sistemik. Memenuhi kriteria kurikulum yang baik sebagaimana disampaikan Mendikbud (2009-2014) Muhammad Nuh. Ia menyatakan bahwa kurikulum yang baik secara manajemen paling tidak harus memenuhi 4 hal yakni kompetensi lulusan, materi, proses pembelajaran dan evaluasi.<sup>47</sup>

### **Strategi Penguatan Moderasi Berasi Beragama Melalui Sistem Pendidikan**

Moderasi beragama menemukan relevansinya untuk dikokohkan di atas dasar filosofi universal dalam konstruk pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Hal ini sangat penting selain sebagai sarana tepat guna menyebarkan sensitivitas civitas akademika pada nalar perbedaan, namun juga sebagai strategi penguatan intelektualisme moderat agar tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda.<sup>48</sup>

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan bahwa moderasi beragama menjadi kontra narasi dari pemahaman-pemahaman eksklusif yang dikembangkan oleh kelompok tertentu. Karena itu, edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama berupa pendirian Rumah Moderasi yang diharapkan menjadi lokomotif gerakan moderasi beragama yang menyampaikan pesan agama yang damai dan toleran, sangat relevan untuk menjadi wadah kontra narasi pemahaman keagamaan yang rigid.

Dalam konteks ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi laboratorium penyemaian nilai-nilai moderat. Dalam sejarah perkembangannya, PTKIN didirikan sebagai kehendak untuk menciptakan model kajian dan pemahaman Islam yang inklusif, akademis, sosiologis, historis, dan filosofis berbasis pada kajian teks dan analisis sosial yang melihat agama sebagai kenyataan kemasyarakatan. Dampak dari hal tersebut, wacana studi keislaman di perguruan tinggi telah diwarnai oleh nuansa akademis. Implikasinya, wacana tentang narasi keagamaan di Indonesia banyak lahir dari dunia akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Nalar intelektualisme inklusif dan kritis inilah yang menjadi kekuatan besar untuk menguatkan tradisi akademik yang toleran.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Nuh, "Kurikulum 2013," *Kompas*, 2013.

<sup>48</sup> Babun Suharto, *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (Yogyakarta: LKIS, 2019), 7.

<sup>49</sup> Babun Suharto, *Moderasi Beragama*, 13.



Hal itu semua dapat terwujud bila semua komponen masyarakat termasuk civitas akademika bersikap moderat baik di ruang nyata serta ruang maya. Rumah moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi wadah untuk menyuarakan (*speak up*) dengan komitmen moderasi beragama dengan kajian, riset, publikasi, serta pendampingan masyarakat.

Para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah meluncurkan buku yang berjudul *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia* (2019). Dalam buku tersebut dipaparkan beberapa langkah strategis penguatan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Pertama*, pengarusutamaan moderasi beragama diimplementasikan dalam segala turunan kebijakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan diwujudkan dengan pengembangan kajian dan tradisi akademik yang kritis dan menghargai kelompok atau pendapat lain. Dalam konteks ini, penyematan kurikulum yang di dalamnya terdapat subjek-subjek ideologis harus selalu dipicu sebagai basis penguatan. Subjek ideologis dapat dibaca misalnya seperti pendidikan Pancasila dan Kewargaan. Secara spesifik, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat menerapkan kebijakan dan pelebagaan nilai-nilai kewargaan dalam budaya pendidikan.

*Kedua*, menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai wadah dan tempat penyemaian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama. Persoalan ini sangat mendesak saat pendidikan Islam kembali menghadapi tantangan serius yang menjamur dalam konstruk pemahaman sektarian dan juga Islam transnasional. Fenomena ini muncul di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dengan gejala Islamisasi yang dibawa oleh sekelompok mahasiswa melalui forum-forum tarbiyah dan pengkaderan. *Ketiga*, mengembangkan literasi keagamaan (*religious literacy*) dan pendidikan lintas iman (*interfaith education*).<sup>50</sup>

Dalam peningkatan literasi keagamaan ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memainkan perannya yang signifikan untuk menyuarakan moderasi beragama melalui ruang digital. Di zaman serba instan dan pragmatis saat ini, pemahaman masyarakat terhadap narasi keagamaan yang bertebaran cenderung mengalami bias dan kontraproduktif. Ada yang terlalu tekstual dalam memahami ayat-ayat suci disertai fanatisme berlebihan sehingga mengarah pada eksklusivisme, ekstremisme, bahkan terorisme. Ada juga yang melampaui batas (*beyond boundaries*) hingga kebablasan menafsirkan kitab suci. Ada pula yang mempermainkan pesan-pesan Tuhan menjadi pesan pribadi yang sarat kepentingan. Konsekuensi logis yang terjadi adalah rentannya konflik kepentingan yang dapat mengoyak tali harmoni kehidupan keagamaan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi keharusan untuk dapat diviralkan,

---

<sup>50</sup> Babun Suharto, *Moderasi Beragama*, 15.

disebarluaskan, disosialisasikan, dan dilafalkan dalam ruang-ruang digital untuk diimplementasikan dalam tataran praktis kehidupan sehari-hari.

Sejauh ini, beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang telah melakukan transformasi pengarusutamaan dan penguatan moderasi beragama melalui ruang-ruang digital antara lain Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, dan perguruan tinggi lainnya yang juga telah mendirikan Rumah Moderasi. Data tersebut dapat dilihat dari kajian-kajian virtual yang diselenggarakan oleh Rumah Moderasi Beragama di lingkungan PTKIN. Hal itu antara lain Pusat Kajian Moderasi Beragama (PKMB) UIN Raden Intan Lampung yang menggelar kajian virtual menggunakan media zoom, facebook, dan youtube untuk membahas pelbagai strategi menumbuhkan sikap moderasi beragama di perguruan tinggi. Sama halnya dengan Rumah Moderasi Beragama IAIN Jember, juga menggelar Webinar series yang membahas tentang penguatan wacana keagamaan moderat dalam ruang digital.

### **Kesimpulan**

Moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan bagi negara yang multikultural seperti Indonesia. Keragaman yang ada menjadikan bangsa yang heterogen ini dihadapkan pada konflik yang berbau rasisme. Munculnya fenomena intoleran, radikal, dan ekstrimis juga menjadi kenyataan yang harus disikapi dengan sangat serius khususnya bagi negara Indonesia, sehingga dengan hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia merasa perlu untuk menjadikan moderasi beragama sebagai fokus kebijakan. Kebijakan penguatan moderasi beragama tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang mengusung penguatan moderasi beragama melalui 5 (lima) strategi penguatan moderasi beragama meliputi; penyiaran agama, sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah, pengelolaan ruang publik, dan pesantren. Namun fokus dan temuan dalam penelitian ini bermuara pada pelaksanaan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi Islam yang mana dibentuknya rumah moderasi beragama di Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Antara. "Cegah Paham Radikal, Densus 88 Garap 75 Katib Di Madura." *Jawa Pos.Com*. 2022.
- Apriani, Ni Wayan, and Ni Komang Aryani. *Moderasi Beragama. Kalangwan Jurnal*

- Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra*. Vol. 12, 2022. <https://doi.org/10.25078/kalangwan.v12i1.737>.
- Bali, Muhammad Mushfi El Iq. "No Title." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2017): 1–14.
- Faishal, Nur. "ASN Terduga Teroris Ditangkap Di Madura, Alarm Di Birokrasi." *Jatim Viva.Com*. 2022.
- Fajar, M Samson, and Sabdo Sabdo. "Akomodasi Budaya Lokal Dalam Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30984/ajip.v3i2.718>.
- Hasan, Noorhaidi, Bertus Hendriks, Lantai Janssen, and Roel Meijer. "Counter Terrorism Strategy in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia." *U.S. Department Of Justice: Office Of Justice Program*. 2012.
- Jalwis. "Sosialisasi Menangkal Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa." *Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (2021): 47–63.
- Muhammad, Rifqi. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik." *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6, no. 1 (2021): 98.
- Munif, Muhammad, and Hasan Baharun. "Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren: Menggagas Interkoneksi Agama Dan Sains." *Jurnal Penelitian* 12, no. 1 (2018): 137. <https://doi.org/10.21043/jp.v12i1.4928>.
- Nasohah, Iin. "Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Melalui Pendidikan Penguatan Karakter Dalam Masyarakat Heterogen." *Prosiding Nasional* 4, no. November (2021): 127–46.
- Nurdin, Nasrullah. "Nationality Insight , State Commitment and Nationalism in the View of Prof . Dr . KH Ali." *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 1 (2018): 105–34.
- Purwanto, Yedi, Qawaid Qawaid, Sa'diyah Ma'rifat Aini, and Ridwan Fauzi. "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17, no. 2 (2019): 110–24. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.605>.
- RI, Tim Redaksi Kementerian Komunikasi dan Informasi. "Kominfo Blokir 20.453 Konten Terorisme Radikalisme Di Media Sosial." *KOMINFO.COM*. April 2021.
- Rosyid, Abdul. "Moderasi Beragama Di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan : Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2022): 101–10.
- Sabdah, Sastra Mayania dan. "Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum: Studi Kasus Di Universitas Lakidende." *Shautut Tarbiyah* 35, no. XXII (2016): 138–55.

- Sukabdi, Zora A., Michael Daffern, James R.P. Ogloff, and Christianity Suwartono. "Competencies for Rehabilitation Professionals Working with Ideology-Based Terrorism Offenders." *Crime, Law and Social Change* 78, no. 2 (2022): 189–217. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10021-6>.
- Unesa, Tim Redaksi. "UNESA Bedah Radikalisme Dan Terorisme Bersama Pakar Dari BNPT, BPIP Dan MPR." *Unesa News*. April 2021.
- Yasir, Ade Indra Kusuma Muhammad. "10 PTN Disebut Survei Terpapar Paham Radikalisme BeratNo Title." *Suara.Com*, 2019.
- Yulianti, Y. "Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Umum Swasta." *Seminar Pendidikan Agama Islam*, 2022, 27–31.
- Adian Husaini (2017), "Bernard Lewis dan Apologia Barat," *Tsaqafah*, Jil. 13, No.1, 25.
- Amiruddin, Askar, dan Yusra "Development of Islamic Religious Education Learning Model Based on Multicultural Values," *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION* 1, no. 1 (15 Juli 2019): 1–19, <https://doi.org/10.24239/ijcied.Vol1.Iss1.2>.
- Antrop, "Manusia Dalam Kehidupan Sosial Perspektif Antropologi", *Jurnal Antropologi*, <https://theperspectiveofanthropology.wordpress.com/2011/01/07/akomodasi-budaya-lokal-dalam-islam>
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Moderasi beragama*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), [http://files/60/Indonesia and Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan - 2019 - Moderasi beragama..pdf](http://files/60/Indonesia%20and%20Badan%20Litbang%20Agama%20dan%20Diklat%20Keagamaan%20-%202019%20-%20Moderasi%20beragama..pdf).
- Delors, "The Treasure within: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together and Learning to Be. What Is the Value of That Treasure 15 Years after Its Publication?"
- Gezim Bara dan Nazmi Xhomara, "The Effect of Student-Centered Teaching and Problem-Based Learning on Academic Achievement in Science," *Journal of Turkish Science Education* 17, no. 2 (2020).
- Happy Saputra, Mahdalena Nasrun and Muhammad Anzaikhan (2021), "Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Melakukan Radikalisme di Aceh," *INOVASI: Jurnal Kajian Inovasi Keagamaan*, Jil. 21, No.2.
- Jacques Delors, "The Treasure within: Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together and Learning to Be. What Is the Value of That Treasure 15 Years after Its Publication?," *International Review of Education* 59, no. 3 (15 Juli 2013): 319–30, <https://doi.org/10.1007/s11159-013-9350-8>.
- Jeanna, Overby. 2012. *Development Psychology*. Delhi: The English Press.
- Jose Antonio Rodríguez, "Islamic religious education and the plan against violent radicalization in Spain," *Journal British Journal of Religious Education*

- 41 (2019): 412–21,  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01416200.2018.1484693>.
- Mary Joy Pigozzi, “A UNESCO View of Global Citizenship Education,” *Educational Review* 58, no. 1 (15 Juli 2006): 1–4,  
<https://doi.org/10.1080/00131910500352473>.
- Mujtaba Saeed Arman, “Student-centered approach to teaching: It takes two to tango,” *The Abjad Journal* 35, no. 2 (2018).
- Nafi Mutaakhirin, “Radikalisme Islam dan Pergerakannya di Media Sosial,” *Afkaruna*, Jil. 11, No.2, (2015).
- Natalya V Solovova et al., “Realization of Student-Centered Approach in Learning Environmental Knowledge,” *Ekoloji* 27 (2018).
- Qurrotul Ainiyah, “Fikih Islam Kontemporer Melalui Karya Khaled Abou El Fadl,” *Yurisprudensi*, Jil. 11, No.1, 22 (2019).
- Rusli Rusli, “Gagasan Khaled Abou Fadl Tentang Islam Moderat versus Islam Puritan (Perspektif Sosiologi Pengetahuan),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Jil. 8, No.1, (2009).
- Rusli Rusli, “Gagasan Khaled Abou Fadl Tentang Islam Moderat versus Islam Puritan (Perspektif Sosiologi Pengetahuan),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Jul. 8, No.1 (2009).
- Suharto, Babun. 2019. *Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia*. Yogyakarta: LkiS.
- Stacey Chamberlain et al., “A global health capstone: an innovative educational approach in a competency- based curriculum for medical students,” *BMC Medical Education*, 2020, 1–8; Cheptoo Ruth, “The „Africanized“ Competency-Based Curriculum: The Twenty-First Century Strides,” *Shanlax* 7, no. 4 (2019): 46–51,  
<https://doi.org/https://doi.org/10.34293/education.v7i4.640>.
- Syafri Samsudin (2021), “Konsep Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer,” Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Trini Diyani, “Implementasi Paradigma Islam Wasatiyyah; Strategi Menjaga Masa Depan Keindonesiaan,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Jil. 6, No.3, (2019).
- Zainun Wafiqatun Niam, “Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan lil 'alamin: Peran Nu dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia,” *Palita: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Jil. 4, No.2, (2019).
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.